

KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

ANTI-POVERTY POLICY GOVERNMENT PROGRAM IN POVERTY ALLEVIATION IN INDONESIA

Mir'atul Insiyah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email Correspondence: mira96421@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze government policies and programs in dealing with poverty in Indonesia. The method used is qualitative with a descriptive approach. Data is obtained from various sources, including books, journals, papers, statistics, and information from the internet. The research results show that the government's attention is focused on five main aspects: maintaining stability in prices of basic commodities, encouraging economic growth that benefits the poor, expanding and perfecting community-based development programs, increasing poor people's access to basic services, and building and improving the social protection system for poor group. In addition, poverty reduction policies are divided into two categories: indirect policies which aim to create conditions that support poverty reduction efforts, and direct policies which focus on increasing participation and productivity of human resources.

Keywords: Policy, Government, Poverty.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan program pemerintah dalam menangani kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, makalah, statistik, dan informasi dari internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memfokuskan perhatian pada lima aspek utama: menjaga stabilitas harga bahan pokok, mendorong pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan masyarakat miskin, memperluas dan menyempurnakan program pembangunan berbasis masyarakat, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar, serta membangun dan memperbaiki sistem perlindungan sosial untuk kelompok miskin. Selain itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori: kebijakan tidak langsung yang bertujuan menciptakan kondisi yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, dan kebijakan langsung yang berfokus pada peningkatan partisipasi serta produktivitas sumber daya manusia.

Kata kunci: Kebijakan, Pemerintah, Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Indonesia, yang merupakan negara kepulauan, memiliki beragam sumber daya alam yang melimpah. Jika dikelola secara optimal, kekayaan ini dapat menjadi pendorong utama bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Namun, meskipun memiliki potensi besar, Indonesia masih tergolong sebagai negara berkembang yang menghadapi berbagai tantangan sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk masalah kemiskinan yang terus menjadi perhatian. Kemiskinan di Indonesia bukan hanya sekadar masalah individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam pemerintahan untuk menjamin kesejahteraan seluruh warganya. Terdapat ketidaksesuaian

yang mencolok antara teori dan praktik dalam penanganan kemiskinan. Banyak kebijakan yang telah diterapkan, namun hasilnya sering kali tidak sesuai dengan harapan dan hanya mengakibatkan pemborosan anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Optimisme terhadap pengentasan kemiskinan muncul dari potensi kekayaan alam Indonesia yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa kemiskinan tetap menjadi masalah yang kompleks dan multifaset. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pendapatan masyarakat, pengangguran, kondisi geografis, serta karakteristik budaya berkontribusi terhadap permasalahan ini. Kemiskinan dapat ditemukan di berbagai daerah, baik di pedesaan maupun perkotaan.

Sejak sebelum reformasi, kemiskinan telah menjadi isu yang mengakar dalam masyarakat Indonesia. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan, hasil yang dicapai belum memuaskan. Banyak program yang dirancang untuk membantu masyarakat kurang mampu sering kali tidak efektif karena kurangnya koordinasi dan evaluasi yang tepat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas bagaimana kebijakan pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan memahami kebijakan yang ada dan tantangan yang dihadapi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia secara menyeluruh.

TINJAUAN PUSTAKA

1) Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar akibat keterbatasan sumber daya, termasuk akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Ini merupakan masalah global yang mencakup kekurangan materi, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan. Selain itu, kemiskinan juga melibatkan aspek sosial, seperti ketidakmampuan berpartisipasi dalam masyarakat. Masyarakat miskin memiliki hak-hak dasar yang sama, termasuk kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Ukuran kemiskinan sering diukur dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok, di mana seseorang dianggap miskin jika kalori makanan harian di bawah 2100 kkal per kapita.

2) Konsep Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu untuk merawat diri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya. Terdapat tiga aspek kemiskinan:

Multidimensi: Berbagai kebutuhan manusia yang beragam menciptakan banyak aspek kemiskinan.

Keterkaitan: Aspek-aspek kemiskinan saling berhubungan; kemunduran dalam satu aspek dapat mempengaruhi yang lain.

Kondisi Sosial: Kemiskinan sering kali terkait dengan kekerasan rumah tangga dan marginalisasi kelompok tertentu.

3) Faktor Penyebab Kemiskinan

Beberapa faktor penyebab kemiskinan meliputi:

Laju Pertumbuhan Penduduk Tinggi: Angka kelahiran yang tinggi dapat membebani lapangan pekerjaan.

Peningkatan Pengangguran: Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan terbatasnya lapangan kerja.

Pendidikan Rendah: Kurangnya pendidikan mengakibatkan rendahnya keterampilan dan peluang kerja.

Bencana Alam: Bencana dapat merusak sumber daya dan meningkatkan kemiskinan.

Distribusi Pendapatan Tidak Merata: Ketimpangan dalam distribusi pendapatan memperburuk kondisi masyarakat miskin.

4) Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan mencakup ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), akses terhadap layanan dasar (kesehatan, pendidikan), dan jaminan masa depan. Ukuran kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan absolut (pendapatan di bawah garis kemiskinan) dan relatif (ketimpangan akibat kebijakan pembangunan).

5) Dampak Kemiskinan

Kemiskinan dapat menyebabkan berbagai dampak negatif:

Meningkatnya Kriminalitas: Individu mungkin melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan.

Tingginya Angka Kematian: Akses kesehatan yang buruk meningkatkan risiko kematian.

Terbatasnya Akses Pendidikan: Masyarakat miskin kesulitan membayar pendidikan yang layak.

Konflik Sosial: Kesenjangan ekonomi dapat memicu konflik antar masyarakat.

6) Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan kecil tetapi tetap tinggi akibat pandemi Covid-19. Pada Maret 2021, angka kemiskinan mencapai 10,14%, dengan daerah paling terdampak adalah Maluku dan Papua. Angka kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan, menunjukkan disparitas yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakat.

METODE

1) Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan analisis data secara deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengungkap situasi sosial tertentu dengan menggambarkan kenyataan yang ada menggunakan kata-kata yang diambil dari konteks alami. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka, yang berfokus pada literatur yang relevan dengan isu penelitian. Kajian ini mencakup analisis konsep dan teori berdasarkan sumber-sumber, terutama artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun dasar teoritis dalam penelitian dan sangat penting untuk mengembangkan aspek teoritis serta praktis.

2) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, di mana penulis mengolah informasi dari berbagai bahan bacaan, termasuk buku, jurnal, makalah, referensi statistik, internet, dan sumber lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kerangka Kebijakan Anti Kemiskinan

Hingga saat ini, belum ada rumusan yang dianggap paling efektif dalam penanganan kemiskinan. Namun, penelitian mengenai konsep dan strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan yang kompleks dan multidimensional terus dilakukan. Menurut Bradshaw (2005), penyusunan kebijakan anti kemiskinan memerlukan kajian yang komprehensif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi keberlanjutan kebijakan tersebut, termasuk pelaku, proses, evaluasi, dan dasar teori yang relevan. Kebijakan anti kemiskinan yang berhasil harus memiliki penjabaran operasional dalam program-programnya. Dasgupta

(2003) menyatakan bahwa desain program penanggulangan kemiskinan yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria:

- a) spesifik untuk situasi tertentu dan sesuai dengan institusi lokal,
- b) relevan dengan permasalahan yang dihadapi,
- c) menyadari bahwa kemiskinan merupakan situasi sebab-akibat yang saling terkait,
- d) memahami potensi konsekuensi negatif, dan
- e) berbasis pada sumber daya lokal.

Chambers et al., sebagaimana dikutip oleh Muktasam (2011), menekankan bahwa keberhasilan dalam merancang program pengentasan kemiskinan bergantung pada:

- a) kesadaran akan nilai-nilai lokal,
- b) pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh, serta
- c) pengembangan sumber daya.

Di sisi lain, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam merancang program pengentasan kemiskinan meliputi:

- a) pendekatan 'target' dan 'top-down',
- b) pengabaian nilai-nilai lokal serta bias dari pihak luar,
- c) kurangnya partisipasi masyarakat,
- d) pendekatan yang tidak holistik, dan
- e) ilusi investasi.

Dengan memahami prinsip-prinsip dalam merancang program penanggulangan kemiskinan, diharapkan dapat dihasilkan program yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

2) Program Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan

Pemerintah Indonesia melaksanakan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan dengan fokus pada lima aspek utama:

- a) Menjaga Stabilitas Harga: Memastikan harga bahan kebutuhan pokok tetap stabil untuk menjamin daya beli masyarakat miskin, terutama beras dan kebutuhan dasar lainnya. Contohnya, pemerintah menyediakan cadangan beras sebanyak 1 juta ton dan melakukan stabilisasi harga komoditas utama.
- b) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif: Menciptakan lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat miskin melalui berbagai program, seperti:
 - 1. Penyediaan dana bergulir untuk usaha mikro.
 - 2. Pelatihan dan pendampingan bagi pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
 - 3. Pembinaan sentra produksi di daerah terpencil.
- c) Pembangunan Berbasis Masyarakat: Meningkatkan sinergi dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan melalui program-program seperti:
 - 1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
 - 2. Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah.
- d) Akses terhadap Pelayanan Dasar: Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Beberapa inisiatif yang dijalankan termasuk:
 - 1. Penyediaan beasiswa untuk siswa dari keluarga miskin.
 - 2. Pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit kelas III.
- e) Sistem Perlindungan Sosial: Melindungi masyarakat miskin dari guncangan sosial dan ekonomi dengan memberikan bantuan sosial kepada kelompok rentan, seperti:
 - 1. Bantuan tunai untuk rumah tangga sangat miskin.
 - 2. Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan dukungan bagi keluarga yang memenuhi syarat.

Program-program pemerintah ini bertujuan untuk secara bertahap mengurangi angka kemiskinan melalui pendekatan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya. Beberapa langkah konkret yang diambil termasuk meningkatkan anggaran APBD untuk penanggulangan kemiskinan, mempertahankan program-program lama seperti RASKIN dan BLT, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menjaga stabilitas harga beras.

3) Strategi dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia

Strategi pembangunan ekonomi bertujuan untuk menciptakan peluang kerja bagi penduduk saat ini, mencapai stabilitas ekonomi, dan mengembangkan basis ekonomi yang beragam. Keberhasilan pembangunan ekonomi diukur dari kemampuannya memenuhi kebutuhan sektor usaha. Menurut Lincoln Arsyad (2000), terdapat empat strategi utama dalam pembangunan ekonomi daerah:

- a) Strategi Pengembangan Fisik: Fokus pada penciptaan identitas daerah, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan daya tarik pusat kota untuk memperbaiki iklim usaha lokal.
- b) Strategi Pengembangan Dunia Usaha: Merupakan elemen penting yang menekankan kreativitas dan daya tarik dunia usaha sebagai cara untuk membangun perekonomian daerah yang sehat.
- c) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia: Dilakukan melalui pelatihan, pembentukan bank keahlian, dukungan untuk lembaga keterampilan, serta pengembangan pelatihan bagi penyandang disabilitas.
- d) Strategi Pengembangan Masyarakat: Bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat tertentu di suatu daerah guna menciptakan manfaat sosial.

Keempat strategi ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan secara efektif.

4) Kebijakan Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan

Kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kategori:

- a) Kebijakan Tidak Langsung: Kebijakan ini bertujuan menciptakan kondisi yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, seperti menciptakan suasana sosial politik yang stabil, ekonomi yang terjaga, dan budaya yang berkembang. Upaya ini mencakup pengelolaan ekonomi makro yang hati-hati melalui kebijakan fiskal dan perpajakan. Pengendalian inflasi juga diarahkan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi penyediaan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat miskin.
- b) Kebijakan Langsung: Fokus pada peningkatan partisipasi dan produktivitas sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Ini dilakukan melalui penyediaan kebutuhan dasar serta pengembangan kegiatan sosial ekonomi berkelanjutan untuk mendorong kemandirian kelompok masyarakat tersebut. Pemenuhan kebutuhan dasar memberikan kesempatan bagi penduduk miskin untuk terlibat dalam kegiatan sosial ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan mereka.

KESIMPULAN

Pengentasan kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional dan strategi yang terintegrasi. Melalui analisis berbagai kebijakan dan program yang telah diterapkan, terlihat bahwa pemerintah telah mengembangkan sejumlah inisiatif untuk menangani masalah kemiskinan. Kebijakan ini mencakup langkah-langkah baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dirancang untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses

masyarakat terhadap kebutuhan dasar, serta memberdayakan sumber daya manusia.

Pertama, strategi pembangunan ekonomi yang berfokus pada penciptaan kesempatan kerja dan stabilitas ekonomi menjadi landasan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan pembangunan ekonomi diukur dari kemampuannya memenuhi kebutuhan dunia usaha dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Empat strategi utama yang dikemukakan oleh Lincolin Arsyad—pengembangan fisik, pengembangan dunia usaha, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan masyarakat menjadi pilar dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Kedua, kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan mencakup kebijakan tidak langsung yang bertujuan menciptakan kondisi sosial politik yang stabil dan kebijakan langsung yang fokus pada peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar serta pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah. Dengan menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mengatasi masalah ini secara berkelanjutan.

SARAN

Dalam upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia, sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program yang ada. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, program tersebut akan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap inisiatif tersebut. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur pendidikan dan keterampilan dengan memperluas akses ke beasiswa dan pelatihan vokasional untuk masyarakat berpendapatan rendah. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga harus terintegrasi dengan kebijakan ekonomi yang lebih luas, sehingga menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap program-program yang berjalan akan membantu mengidentifikasi keberhasilan serta tantangan, dan memberikan dasar untuk perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas harus menjadi fokus utama, dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan potensi sumber daya yang ada. Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi mengenai program bantuan sosial dan peluang usaha juga sangat dianjurkan. Terakhir, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah (NGO) perlu didorong untuk memperluas sumber daya dan inovasi dalam merancang program-program penanggulangan kemiskinan. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiono, Benny. 2014. Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan., ISSN 2087-2607. Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhan. Vol. 5 No.1.
- Ariyani, Nafiah, 2015. Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Metode Rappoverty, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 6 No. 5
- Arsyad, Lincolin. (2010). Ekonomi Pembangunan. Ed 5, Penerbit: AMP YKPN

-
- Barlinti, Yeni Salma. 2007. Kebijakan- kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Lex Jurnalica*, Vol.4 No.3
- Bradshaw, T. K. 2005. Theories of poverty and anti-poverty programs in community development. RPRC Working Paper No. 06-05. Conference on Development Economics, Washington, DC: World Bank
- Dasgupta, P. 2003. World poverty: Causes and pathways. Paper presented at World Bank
- Fadilla, Arif. 2017. Analisis Kebijakan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kota Tangerang Provinsi Banten. ISSN: 2503-4413. Tangerang: Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 6 Nomor 1
- Itang, 2013. Penyebab Kemiskinan dan Cara Menanggulangnya. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.4 No.1
- J. Moleong, Lexy, 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosadakarya).
- Josef Papilaya. 2020. Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan . *Jurnal bimbingan dan konseling terapan*. Volume. 4 No. 1.
- Muktazam dan Nurjanah, S. 2011. Kajian kritis atas fenomena dan program pengentasan kemiskinan pada masyarakat sekitar hutan di pulau Lombok. Laporan penelitian.